



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAH ROSDIANA
2. Jabatan : ARSITEK SI EKSEKUTIF
3. NHK : 246904

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.988.000.000**

1. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.838.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.397.400.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ HONDA JAZZ RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT ABS150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA UNITED R20 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, HONDA CITY SEDAN HATCHBACK RS CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



6. MOBIL, HONDA HONDA NEW CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 653.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	257.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	540.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.955.931.790
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.138.331.790
III. HUTANG	Rp.	305.533.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.832.798.790

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.